

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Neneng Erlina Indriati (2014) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan). Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). (Jurnal;Ekonomi dan studi pembangunan,Dipublikasikan)	Secara rata-rata terjadi inefisiensi, namun selama periode penelitian untuk efisiensi teknis biaya bidang pendidikan yang konsisten mencapai skor efisiensi maksimum 100 persen adalah Kecamatan Batu Lanteh. Sedangkan daerah yang sudah mencapai kondisi efisien dalam teknis sistem adalah Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Rhee dan Kecamatan Maronge.
2	Indomas Gusti Maredh Nesia (2018) Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Pada Tahun 2010-2016. Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). (Skripsi;Dipublikasikan)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan 3 tahun dari sampel 7 tahun mengalami efisiensi sempurna yaitu pada tahun 2010, 2013, dan 2014. Serta terdapat 4 dari 7 kurun waktu yang diambil untuk sampel yang mengalami tingkat efisiensi tidak sempurna yaitu pada tahun 2011, 2012, 2015, dan 2016.
3	Asprilla Dedy Perdana (2017) Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2015. Penelitian	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang mampu mencapai dan mempertahankan tingkat efisien (100%) yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, dan

	<p>ini menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). (Skripsi;Dipublikasikan)</p>	<p>Kabupaten Sleman. Sedangkan Kabupaten/kota yang mengalami inefisien adalah kabupaten Bantul yang hanya mampu meraih tingkat efisiensi pada tahun 2013 sebesar 69,1%, tahun 2014 sebesar 64,41%, dan pada tahun 2015 sebesar 65,24%.</p>
4	<p>Zulfahmi Pratama, I Wayan Subagiarta, Badjuri (2016) Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintahan Daerah Di Provinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). (Skripsi;Dipublikasikan)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur cenderung sama nilainya dan mengalami inefisien. Kota Madiun dan Kota Malang pada tahun 2009 mempunyai tingkat efisien sempurna (100%), akan tetapi pada tahun 2010-2012, Kota Malang dan Kota Madiun mengalami penurunan tingkat efisien. Sedangkan Kota Batu dan Kota Mojokerto mengalami kenaikan tingkat efisien yang mencapai 100%.</p>
5	<p>Duta Sabilila Rusydi, Dewi Kusuma Wardani, Salman A. Totalia (2015). Analisis Efisiensi Relatif Penggunaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012. Penelitian ini menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). (Jurnal;Dipublikasikan)</p>	<p>Terdapat 12 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2007, 8 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2008, 6 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2009, 5 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2010, 6 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2011 dan 9 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2012. Lalu Terdapat 23 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2007, 27 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2008, 29 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2009, 30 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2010, 29 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2011 dan 26 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2012.</p>

Berdasarkan penelitian- penelitian terdahulu, penggunaan modal dana berupa pendapatan regional sebagai input daerah dalam mencapai pembangunan wilayah yang baik terhadap output daerah yang merupakan hasil dari sebuah perwujudan kebutuhan suatu daerah, dimana modal dana yang digunakan sesuai dengan nominal yang sudah dianggarkan. Adapun anggaran tiap daerah memiliki nominal yang berbeda dan cara penggunaan anggaran tersebut juga berbeda sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah masing-masing. Maka dari itu, perlunya mengukur efisiensi pengelolaan pendapatan regional sebagai input dalam meraih output suatu daerah menggunakan metode DEA, sehingga dapat dikatakan suatu daerah bisa mengevaluasi kinerja dalam mengalokasikan variabel input untuk mencapai variabel output agar mencapai tingkat yang efisien berupa efisien relatif 1,000 atau 1%. Hal ini merujuk pada penelitian Duta Sabiila Rusydi, Dewi Kusuma Wardani dan Salman A. Totalia (2015) yaitu Analisis Efisiensi Relatif Penggunaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2012. Letak perbedaannya adalah pada variabel dan objek yang diteliti, dimana pada penelitian ini akan meneliti alokasi pendapatan daerah menggunakan variabel input PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap variabel output laju pertumbuhan ekonomi dan IPM pada 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Sementara penelitian oleh Duta Sabiila Rusydi, Dewi Kusuma Wardani dan Salman A. Totalia menggunakan variabel input PAD, DAU, DAK, Dana bagi hasil, jumlah penduduk terhadap PDRB dan IPM pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari hasil sumber-sumber yang ada di daerah tersebut yang diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Saqia, Dinar Putri (2016)]

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 13 yaitu Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 6 bahwa dana perimbangan terdiri dari:

- a) Bagian daerah dari PBB, BPHTB, dan penerimaan SDA
- b) Dana Alokasi Umum
- c) Dana Alokasi Khusus

2.2.2.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat 2 terdiri atas:

Daerah mendapatkan 90% bagian Pajak Bumi Bangunan (PBB) dengan rincian sebagai berikut:

16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi

64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi

9% untuk biaya pemungutan

Sedangkan pemerintah mendapatkan 10% bagian Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB dengan rincian sebagai berikut:

1. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota
2. 35% dibagikan secara insentif kepada seluruh kabupaten/kota

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB berupa 80% dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16% diberikan kepada daerah yang bersangkutan dan masuk ke kas umum daerah
- b) 64% diberikan kepada daerah penghasil BPHTB dan masuk ke kas umum daerah

2.2.2.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 1 bahwa dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan kepada daerah yang bertujuan agar terlaksananya pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikut rincian perhitungan DAU menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 7 sebagai berikut:

- A. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari APBN
- B. DAU diberikan kepada daerah masing-masing sebesar 10%
- C. Jika terjadinya perubahan kewenangan suatu daerah, maka persentasi DAU disesuaikan dengan perubahan tersebut
- D. DAU ditetapkan atas perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah dengan porsi daerah yang sudah ditentukan

2.2.2.3 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 bahwa dana alokasi khusus atau DAK merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditujukan kepada daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan tertentu. Berikut rincian perhitungan DAK dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 8:

- a) DAK yang dimaksud berasal dari dana reboisasi dengan imbang 40% diberikan kepada daerah penghasil
- b) DAK yang berasal dari dana reboisasi dengan imbang 60% yang diberikan kepada pemerintah pusat
- c) Kebutuhan tertentu yang dialokasikan dari DAK merupakan kebutuhan yang tidak bisa diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan suatu prioritas nasional

2.2.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak berasal dari PAD dan dana perimbangan, dimana terdiri dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang sudah ditetapkan pemerintah [Duta Sabila, Dewi Kusuma, Salman A, 2015]. Berikut rincian lain-lain pendapatan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan Bunga
- d) Keuntungan selisih dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Hasil dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah

2.2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Menurut Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh dalam jangka panjang yang disebabkan oleh beberapa syarat yang diperlukan dalam perekonomian. Fungsi produksi dalam teori ini adalah ketika modal hanya menciptakan suatu tingkat output tertentu, ketika kombinasi modal berubah maka output yang dihasilkan juga berubah. Dalam menumbuhkan perekonomian maka dibutuhkan adanya stok modal berupa investasi-investasi baru [Nugroho, Stefanus Aditya, 2009]

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan besaran tingkat penduduk yang dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang layak [Badan Pusat Statistik]. Suatu daerah bisa

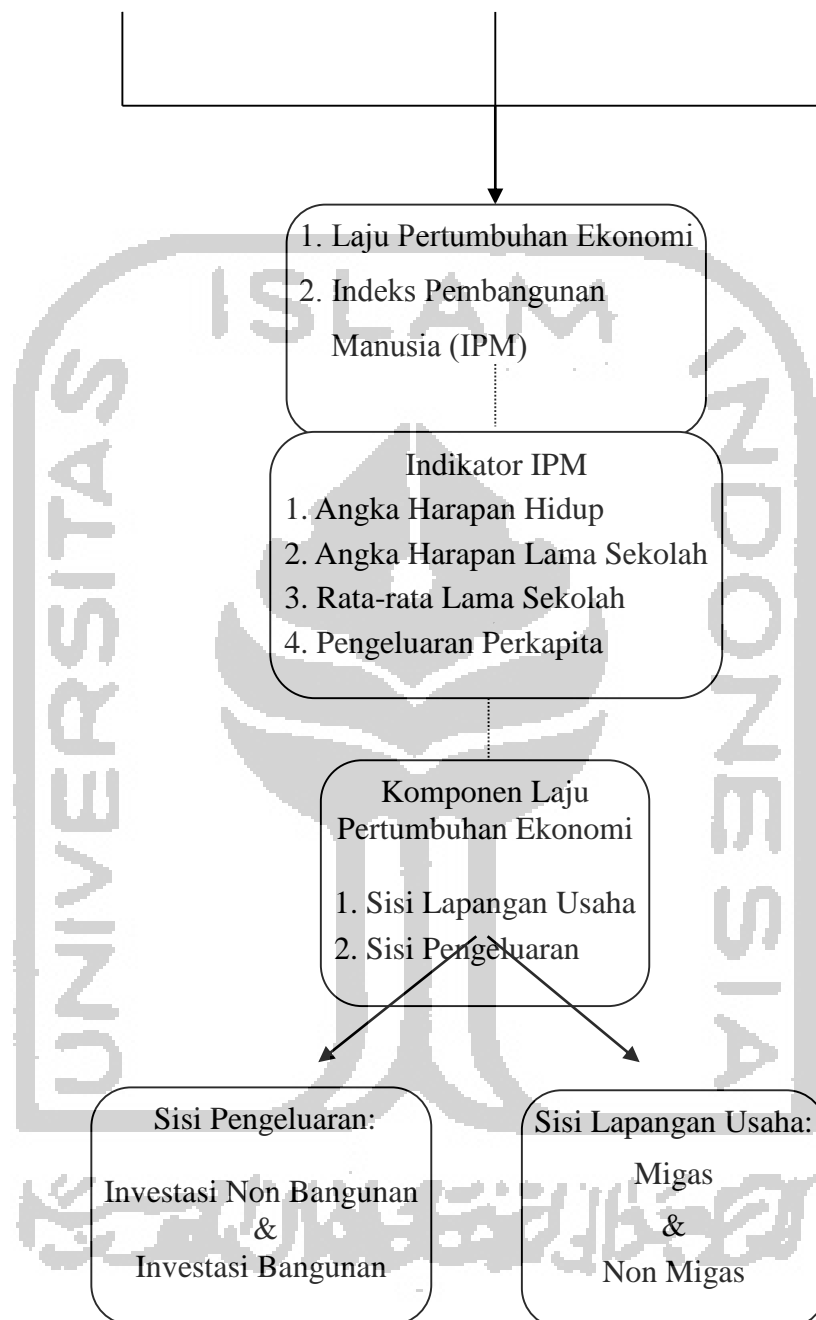
dikatakan berhasil dalam pembangunan wilayahnya dapat diukur menggunakan beberapa parameter, salah satunya IPM atau *Human Development Indeks* (HDI) dimana IPM menggunakan 3 indikator yakni angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Maka dari itu IPM merupakan ukuran untuk memperlihatkan kinerja suatu daerah dalam pembangunan ekonomi mencakup kualitas hidup penduduk dan standar hidup yang layak [Zulfikar Mohamad, 2017]

2.2.6 Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah suatu cara dalam bentuk usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu hal secara tepat dan optimal dengan memperhatikan segi waktu, tenaga, maupun biaya yang diminimalisir [D Sagitariansyah, 2011]. Menurut Mulyadi (2007), Efisiensi adalah ketepatan suatu cara dalam menjalankan sesuatu dengan meminimalisir waktu, biaya, dan tenaga dimana terdapat rasio input dan output atau biaya dan keuntungan.

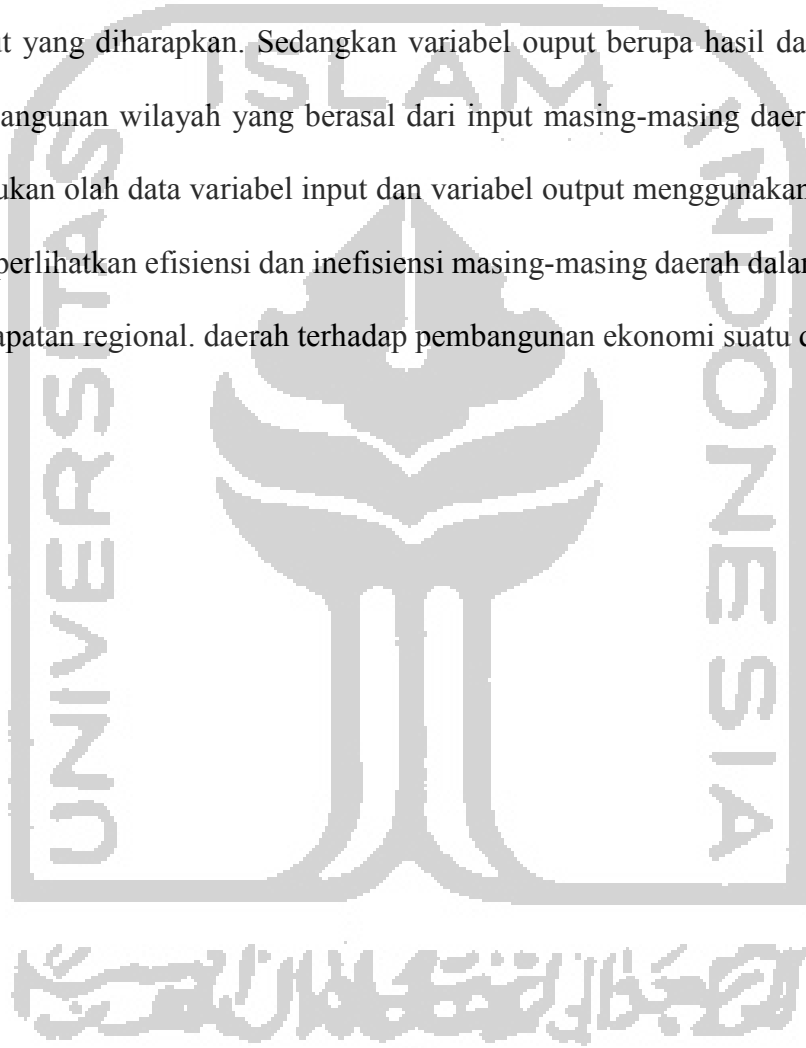
2.3 Kerangka Pemikiran





Penelitian ini menggunakan metode DEA, dimana dalam operasinya menggunakan variabel input yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan variabel outputnya

yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel input pada 4 daerah di Jawa Barat antara lain Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi berupa pendapatan regional yang dialokasikan untuk pengembangan pembangunan wilayah dalam mewujudkan output yang diharapkan. Sedangkan variabel output berupa hasil dari perwujudan pembangunan wilayah yang berasal dari input masing-masing daerah. Kemudian dilakukan olah data variabel input dan variabel output menggunakan DEA dimana memperlihatkan efisiensi dan inefisiensi masing-masing daerah dalam penggunaan pendapatan regional. daerah terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang dipublikasi oleh instansi atau organisasi yang bukan pengelolanya, dan laporan